

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Konsep pembangunan merupakan suatu upaya terarah, sistematis yang dilakukan menuju perubahan yang lebih baik dari kondisi terdahulu. Perubahan yang dimaksud adalah gerakan menuju arah peningkatan dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan. Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan manifestasi tanggung jawab Pemerintah sebagai urusan wajib dalam penyediaan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terutama bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS). Pada gilirannya diharapkan upaya ini mampu meningkatkan kesejahteraan PMKS dalam melaksanakan peran dan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Lamongan, komitmen pembangunan di bidang sosial tersebut telah menjadi agenda utama pembangunan tahun 2016-2021, yaitu upaya meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama *wong cilik*, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Agenda utama pembangunan daerah tersebut sesungguhnya merupakan respon atas permasalahan kemiskinan yang masih cukup tinggi termasuk didalamnya penyandang permasalahan kesejahteraan sosial.

Untuk merealisasikan agenda tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan membentuk Dinas Sosial, Pembentukan ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan menyelenggarakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang mencakup Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Untuk mengetahui kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan di bidang Sosial, maka Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, tiap akhir tahun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasar pada :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang No. 28 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. PP No. 8 Th. 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. PP No.8 Th. 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Inpres No. 5 Th. 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Permendagri No. 54 th 2010 tentang Pelaksanaan PP No.8 Th. 2008;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Th. 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Kepala LAN RI No. 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Lamongan merupakan perwujudan kewajiban Dinas Sosial Kabupaten Lamongan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian visi dan misi yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Pengukuran kinerja tersebut di samping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis dapat dilihat sebagai sistem lacak kinerja masing-masing program pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.

Penilaian atas keberhasilan/kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran, hal ini berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai/diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun atau kurang.

B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan dan Perbup 86 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamongan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, membawahi :
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
 - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 1.3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi;

- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 1.4.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 1.4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 1.4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 1.4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 1.5.1. Pengadaan Mebel;
 - 1.5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 1.6.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
 - 1.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 1.7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 1.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
2. Program Pemberdayaan Sosial:
 - 2.1. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang;
 - 2.2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2.2.1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 2.2.2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 2.2.3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2.2.4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2.2.5. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
 3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan:
 - 3.1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota Untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal;

3.1.1. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;

4. Program Rehabilitas Sosial:

4.1. Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;

4.1.1. Penyediaan Permakanan;

4.1.2. Penyediaan Sandang;

4.1.3. Penyediaan Alat Bantu;

4.1.4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;

4.1.5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial;

4.1.6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat;

4.1.7. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak;

4.1.8. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;

4.1.9. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;

4.1.10. Pembelian Layanan Kedaruratan;

4.1.11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;

4.1.12. Pemberian Layanan Rujukan;

4.2. Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;

- 4.2.1. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;
 - 4.2.2. Pemberian Layanan Kedaruratan;
 - 4.2.3. Penyediaan Permakanan;
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial:
- 5.1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar;
 - 5.1.1. Rujukan Anak-Anak Terlantar;
 - 5.1.2. Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar;
 - 5.2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5.2.1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5.2.2. Pengelolaaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5.2.3. Fasilitas Bantuan Sosial Kekeluargaan
 - 5.2.4. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
6. Program Penanganan Bencana:
- 6.1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota;
 - 6.1.1. Penyediaan Makanan;
 - 6.1.2. Penyediaan Sandang;
 - 6.1.3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - 6.1.4. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 - 6.1.5. Pelayanan Dukungan Psikososial
 - 6.2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - 6.2.1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

6.2.2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung
Taruna Bencana

7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan:

7.1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota;

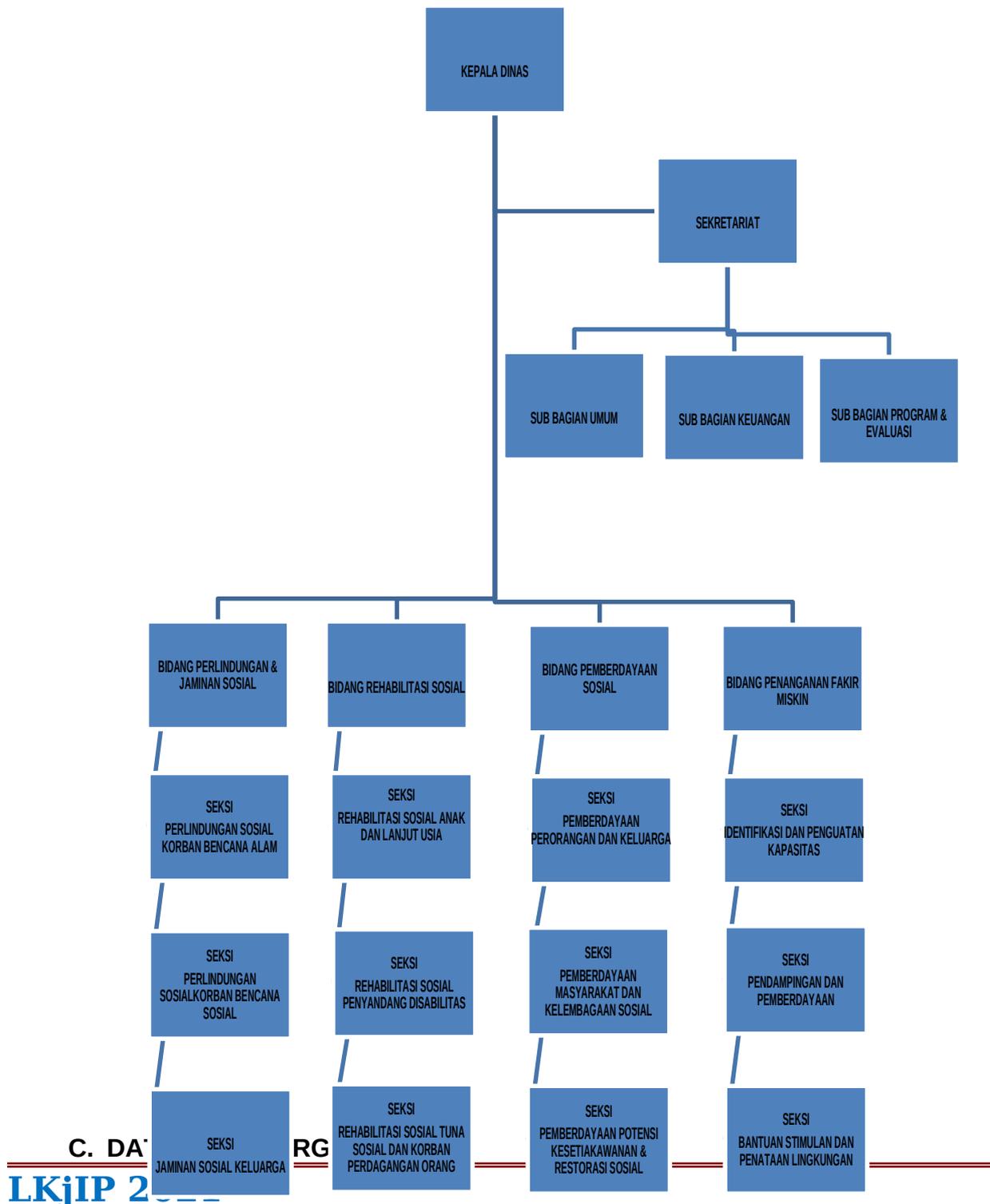
7.1.1. Rehabilitas Sarana dan Prasarana Taman Makam
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;

7.1.2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota

7.1.3. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan struktur organisasi di bawah ini :

Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIALKABUPATEN LAMONGAN
Perbup Nomor : 86 Tahun 2020



1. Personil

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan didukung oleh 18 orang, yang mempunyai latar belakang pendidikan mulai dari SLTA sampai dengan Magister (S2).

NO	JABATAN STRUKTURAL	JMLH	PANGKAT / GOLONGAN	JMLH	PENDIDIKAN FORMAL	JMLH	KET
1	Kepala Dinas	1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	S2	1	
2	Sekretaris	1	Pembina Tk. I (IV/b)	1	S.2	1	
3	Kepala Bidang	3	Pembina (IV/a)	3	S.2	3	
4	Kepala Seksi	8	Pembina (IV/a)	1	S.2	1	
			Penata Tk. I (III/d)	1	S.2	1	
				5	S.1	5	
			Penata (III/c)	1	S.2	1	
5	Staf	5	Penata Muda Tk. I (III/c)	1	S.2	1	
			Penata Muda (III/b)	2	S.1	2	
				1	SLTA	1	
			Penata Muda (III/a)	1	D.3	1	
JUMLAH		18		18		18	

2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kegiatan tugas sehari-hari, Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dilengkapi dengan sarana dan prasarana.

Tabel 2.2.2
Data Sarana dan Prasarana
di DINAS SOSIAL Kab. Lamongan Tahun 2021

NO	JENIS BARANG	BAIK	NILAI (Rp)	RUSAK ATAU TIDAK DI GUNAKAN	NILAI (Rp)	JUMLAH
1	Station Wagon (Station Wagon)	1	137.000.000,00	0	0	1
2	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17.639.000,00	0	0	1
3	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	28.964.000,00	0	0	1
4	Printer (Printer)	1	6.514.000,00	0	0	1
5	Server (Server)	1	128.283.000,00	0	0	1
6	tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	3.625.000.000,00	0	0	1
7	tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	17.000.000,00	0	0	1
8	Jeep (Jeep)	1	199.028.545,00	1	0	1
9	Station Wagon (Station Wagon)	1	120.000.000,00	0	0	1
10	Station Wagon (Station Wagon)	1	125.000.000,00	0	0	1
11	Station Wagon (Station Wagon)	1	157.200.000,00	0	0	1
12	Station Wagon (Station Wagon)	1	213.858.962,00	0	0	1
13	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah) (Station Wagon)	1	201.398.000,00	0	0	1
14	Sepeda Motor (Sepeda Motor)	1	13.670.000,00	0	0	1
15	Sepeda Motor (Sepeda Motor)	1	5.500.000,00	0	0	1
16	Sepeda Motor (Sepeda Motor)	1	9.891.611,00	0	0	1
17	Sepeda Motor (Sepeda Motor)	1	12.672.000,00	0	0	1
18	Sepeda Motor (Sepeda Motor)	1	2.000.000,00	1	0	1
19	Sepeda Motor (Sepeda Motor)	1	11.600.000,00	0	0	1
20	Sepeda Motor (Sepeda Motor)	1	18.255.000,00	0	0	1
21	Sepeda Motor (Sepeda Motor)	1	13.670.000,00	0	0	1

DINAS SOSIAL

22	Sepeda Motor (Sepeda Motor)	0	5.000.000,00	1	0	1
23	Sepeda Motor (Sepeda Motor)	1	13.670.000,00	0	0	1
24	Sepeda Motor (Sepeda Motor)	0	5.000.000,00	1	0	1
25	Sepeda Motor (Sepeda Motor)	0	5.000.000,00	1	0	1
26	Sepeda Motor (Sepeda Motor)	0	5.000.000,00	1	0	1
27	Sepeda Motor (Sepeda Motor)	0	5.000.000,00	1	0	1
28	Lemari Besi/kayu (Lemari Besi / Metal)	1	2.243.500,00	0	0	1
29	Lemari Besi/kayu (Lemari Besi / Metal)	1	5.021.000,00	0	0	1
30	Lemari Besi/kayu (Lemari Besi / Metal)	1	3.089.670,00	0	0	1
31	Lemari Besi/kayu (Lemari Besi / Metal)	1	3.089.666,00	0	0	1
32	Lemari Besi/kayu (Lemari Besi / Metal)	1	5.021.000,00	0	0	1
33	Lemari Besi/kayu (Lemari Besi / Metal)	1	3.089.666,00	0	0	1
34	Lemari Besi/kayu (Lemari Besi / Metal)	1	5.267.700,00	0	0	1
35	Lemari Besi/kayu (Lemari Besi / Metal)	1	3.089.666,00	0	0	1
36	Lemari Besi/kayu (Lemari Besi / Metal)	1	3.089.666,00	0	0	1
37	Lemari Besi/kayu (Lemari Besi / Metal)	1	3.089.666,00	0	0	1
38	Rak Besi/Metal (Rak Besi / Metal)	1	1.853.750,00	0	0	1
39	Rak Kayu (Rak Kayu)	1	1.750.000,00	0	0	1
40	Filling Besi/Metal (Filling Besi / Metal)	1	2.500.000,00	0	0	1
41	Filling Besi/Metal (Filling Besi / Metal)	1	2.238.000,00	0	0	1
42	Band Kas (Band Kas)	1	3.605.000,00	0	0	1
43	Lain-lain (lain-lain)	1	5.000.000,00	0	0	1
44	Lain-lain (lain-lain)	1	11.135.700,00	0	0	1

DINAS SOSIAL

45	Lain-lain (lain-lain)	1	11.135.700,00	0	0	1
46	Lain-lain (lain-lain)	1	11.135.700,00	0	0	1
47	Lain-lain (lain-lain)	1	11.135.700,00	0	0	1
48	Lain-lain (lain-lain)	1	11.135.700,00	0	0	1
49	Lain-lain (lain-lain)	1	11.135.700,00	0	0	1
50	Lain-lain (lain-lain)	1	11.135.700,00	0	0	1
51	Lain-lain (lain-lain)	1	11.135.700,00	0	0	1
52	Lain-lain (lain-lain)	1	11.135.900,00	0	0	1
53	Faximile (Faximile)	1	3.123.800,00	0	0	1
54	Lemari Kayu (Lemari Kayu)	0	1.000.000,00	1	0	1
55	Lemari Kayu (Lemari Kayu)	0	3.250.000,00	1	0	1
56	Lemari Kayu (Lemari Kayu)	1	2.000.000,00	0	0	1
57	Meja Rapat (Meja Rapat)	1	2.825.000,00	0	0	1
58	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	1.000.000,00	0	0	1
59	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	2.500.000,00	0	0	1
60	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	899.500,00	0	0	1
61	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	2.770.668,00	0	0	1
62	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	2.500.000,00	0	0	1
63	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	1.000.000,00	0	0	1
64	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	2.770.666,00	0	0	1
65	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	899.500,00	0	0	1
66	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	2.500.000,00	0	0	1
67	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	1.000.000,00	0	0	1
68	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	899.500,00	0	0	1
69	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	2.770.666,00	0	0	1
70	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	2.500.000,00	0	0	1
71	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	1.000.000,00	0	0	1
72	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	2.500.000,00	0	0	1
73	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	1.000.000,00	0	0	1

DINAS SOSIAL

74	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	2.500.000,00	0	0	1
75	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	1.000.000,00	0	0	1
76	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	2.500.000,00	0	0	1
77	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	1.000.000,00	0	0	1
78	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	2.500.000,00	0	0	1
79	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	1.000.000,00	0	0	1
80	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	2.500.000,00	0	0	1
81	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	1.000.000,00	0	0	1
82	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	2.500.000,00	0	0	1
83	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	1.000.000,00	0	0	1
84	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	1.000.000,00	0	0	1
85	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	1.000.000,00	0	0	1
86	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	1.000.000,00	0	0	1
87	Meja Telp (Meja Telepon)	1	750.000,00	0	0	1
88	Kursi tamu (Kursi Tamu Eselon II)	1	2.901.700,00	0	0	1
89	Kursi tamu (Kursi Tamu)	1	10.000.000,00	0	0	1
90	Kursi tamu (Kursi Tamu)	1	3.500.000,00	0	0	1
91	Kursi tamu (Kursi Tamu)	1	750.000,00	0	0	1
92	Kursi Putar (Kursi Puter)	1	1.598.668,00	0	0	1
93	Kursi Putar (Kursi Puter)	1	1.598.666,00	0	0	1
94	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	760.500,00	0	0	1
95	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	750.000,00	0	0	1
96	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	760.500,00	0	0	1
97	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	750.000,00	0	0	1
98	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	760.500,00	0	0	1
99	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	750.000,00	0	0	1
100	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	760.500,00	0	0	1
101	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	750.000,00	0	0	1

102	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	760.500,00	0	0	1
103	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	750.000,00	0	0	1
104	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	733.400,00	0	0	1
105	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	750.000,00	0	0	1
106	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	733.400,00	0	0	1
107	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	750.000,00	0	0	1
108	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	733.400,00	0	0	1
109	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	750.000,00	0	0	1
110	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	731.400,00	0	0	1
111	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	750.000,00	0	0	1
112	Kursi Lipat (Kursi lipat)	1	731.400,00	0	0	1
113	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	750.000,00	0	0	1
114	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	731.400,00	0	0	1
115	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	731.400,00	0	0	1
116	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	731.400,00	0	0	1
117	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	731.400,00	0	0	1
118	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	731.400,00	0	0	1
119	Kursi Lipat (kursi Lipat)	1	731.400,00	0	0	1
120	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	731.400,00	0	0	1
121	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	731.400,00	0	0	1
122	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	731.400,00	0	0	1
123	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	731.400,00	0	0	1
124	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	731.400,00	0	0	1
125	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	731.400,00	0	0	1
126	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	731.400,00	0	0	1
127	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	731.400,00	0	0	1
128	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	731.400,00	0	0	1
129	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	731.400,00	0	0	1

130	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1.160.300,00	1	0	1
131	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1.160.300,00	1	0	1
132	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1.160.300,00	0	0	1
133	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1.160.300,00	0	0	1
134	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1.160.800,00	0	0	1
135	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1.160.800,00	0	0	1
136	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1.160.800,00	0	0	1
137	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1.160.800,00	0	0	1
138	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1.160.800,00	0	0	1
139	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1.160.800,00	0	0	1
140	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1.160.800,00	0	0	1
141	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1.160.800,00	0	0	1
142	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1.160.800,00	0	0	1
143	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1.160.800,00	0	0	1
144	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1.160.800,00	0	0	1
145	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1.160.800,00	0	0	1
146	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1.160.800,00	0	0	1
147	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1.160.800,00	0	0	1
148	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1.160.800,00	0	0	1
149	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1.160.800,00	0	0	1
150	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1.160.800,00	0	0	1
151	Rak Besi/Metal (Rack Server)	1	13.003.000,00	0	0	1
152	Kursi Pelayanan (Kursi Pelayanan SLRT)	1	1.998.300,00	0	0	1
153	Kursi Pelayanan (Kursi Pelayanan SLRT)	1	1.998.300,00	0	0	1
154	Meja Pelayanan (Meja Pelayanan SLRT)	1	12.816.700,00	0	0	1
155	Meja Kerja (Meja Kerja Eselon IV)	1	3.323.200,00	0	0	1

DINAS SOSIAL

156	Meja Kerja (Meja Kerja Eselon IV)	1	3.323.200,00	0	0	1
157	Meja Kerja (Meja Kerja Eselon IV)	1	3.323.200,00	0	0	1
158	Meja Kerja (Meja Kerja Eselon IV)	1	3.323.200,00	0	0	1
159	Meja Kerja (Meja Kerja Eselon IV)	1	3.323.200,00	0	0	1
160	Lemari Arsip Besi (Almari Arsip Besi Kaca)	1	3.500.000,00	0	0	1
161	Lemari Arsip Besi (Almari Arsip Besi)	1	3.057.400,00	0	0	1
162	Lemari Arsip Besi (Almari Arsip Besi Kaca)	1	3.500.000,00	0	0	1
163	Lemari Arsip Besi (Almari Arsip Besi Kaca)	1	3.500.000,00	0	0	1
164	Lemari Arsip (Lemari Arsip)	1	7.291.300,00	0	0	1
165	Lemari Arsip (Lemari Arsip)	1	7.291.300,00	0	0	1
166	Lemari Arsip (Lemari Arsip)	1	7.291.300,00	0	0	1
167	Lemari Arsip (Lemari Arsip)	1	7.291.300,00	1	0	1
168	Lemari Arsip (Lemari Arsip)	1	7.291.300,00	1	0	1
169	Lemari Arsip (Almari Arsip Besi)	1	8.841.000,00	0	0	1
170	Lemari Arsip (Almari Arsip Besi)	1	8.842.000,00	0	0	1
171	Lemari Arsip (Almari Arsip Besi)	1	8.842.000,00	0	0	1
172	Lemari Arsip (Almari Arsip Besi)	1	8.842.000,00	0	0	1
173	Lemari Arsip (Almari Arsip Besi)	1	8.842.000,00	0	0	1
174	Lemari Arsip (Almari Arsip Besi)	1	8.842.000,00	0	0	1
175	Kursi Kerja (Kursi Kerja Eselon IV)	1	2.547.600,00	0	0	1
176	Kursi Kerja (Kursi Kerja Eselon IV)	1	2.547.600,00	0	0	1
177	Kursi Kerja (Kursi Kerja Eselon IV)	1	2.547.600,00	0	0	1
178	Kursi Kerja (Kursi Kerja Eselon IV)	1	2.547.600,00	0	0	1
179	Kursi Kerja (Kursi Kerja Eselon IV)	1	2.547.600,00	0	0	1
180	AC Unit (AC Unit)	1	4.118.500,00	0	0	1
181	Kipas Angin (Kipas Angin)	1	762.400,00	0	0	1
182	Kipas Angin (Kipas Angin)	1	762.400,00	0	0	1

DINAS SOSIAL

183	Kipas Angin (Kipas Angin)	1	761.400,00	0	0	1
184	Kipas Angin (Kipas Angin)	1	857.400,00	0	0	1
185	Kipas Angin (Kipas Angin)	1	857.400,00	0	0	1
186	Kipas Angin (Kipas Angin)	1	857.400,00	0	0	1
187	Kipas Angin (Kipas Angin)	1	857.400,00	0	0	1
188	Sound System (Sound System)	1	6.444.000,00	0	0	1
189	Tempat Tidur (Tempat Tidur)	1	1.624.000,00	0	0	1
190	Tempat Tidur (Tempat Tidur)	1	1.624.000,00	0	0	1
191	Pompa Air (Pompa Air)	1	1.969.000,00	0	0	1
192	SPRINGBAG ()	1	3.021.000,00	0	0	1
193	SPRINGBAG ()	1	3.021.000,00	0	0	1
194	SPRINGBAG ()	1	3.021.000,00	0	0	1
195	SPRINGBAG ()	1	3.020.000,00	0	0	1
196	RAK TV (Televisi)	1	4.693.600,00	0	0	1
197	Lain-lain (lain-lain)	1	11.135.800,00	0	0	1
198	Lain-lain (lain-lain)	1	11.135.800,00	0	0	1
199	Lain-lain (lain-lain)	1	11.135.800,00	0	0	1
200	Lain-lain (lain-lain)	1	11.135.700,00	0	0	1
201	Lain-lain (lain-lain)	1	15.083.950,00	0	0	1
202	Lain-lain (lain-lain)	1	15.083.950,00	0	0	1
203	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	7.995.000,00	0	0	1
204	P.C. Unit (P.C Unit)	1	12.000.250,00	0	0	1
205	P.C. Unit (Komputer)	1	10.319.000,00	0	0	1
206	P.C. Unit (P.C Unit)	1	8.200.500,00	0	0	1
207	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	9.047.300,00	0	0	1
208	P.C. Unit (P.C Unit)	1	11.976.000,00	0	0	1
209	P.C. Unit (P.C Unit)	0	6.518.500,00	1	0	1
210	P.C. Unit (P.C Unit)	1	6.900.000,00	0	0	1
211	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	16.631.700,00	0	0	1

212	P.C. Unit (P.C Unit)	0	6.518.500,00	1	0	1
213	P.C. Unit (Komputer)	1	10.319.000,00	0	0	1
214	P.C. Unit (P.C Unit)	1	8.523.000,00	0	0	1
215	P.C. Unit (P.C Unit)	1	12.000.250,00	0	0	1
216	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	7.995.000,00	0	0	1
217	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	16.631.700,00	0	0	1
218	P.C. Unit (P.C Unit)	1	12.000.250,00	0	0	1
219	P.C. Unit (PC UNIT)	1	6.192.000,00	0	0	1
220	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	7.995.000,00	0	0	1
221	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17.166.440,00	0	0	1
222	P.C. Unit (P.C Unit)	1	12.000.250,00	0	0	1
223	P.C. Unit (PC UNIT)	1	6.191.000,00	0	0	1
224	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	10.800.000,00	0	0	1
225	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17.166.440,00	0	0	1
226	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	10.800.000,00	0	0	1
227	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	10.800.000,00	0	0	1
228	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17.166.440,00	0	0	1
229	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	10.800.000,00	0	0	1
230	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17.166.440,00	0	0	1
231	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	10.600.000,00	0	0	1
232	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17.166.440,00	0	0	1
233	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17.166.440,00	0	0	1
234	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17.166.440,00	0	0	1
235	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17.166.440,00	0	0	1
236	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17.167.440,00	0	0	1
237	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17.167.440,00	0	0	1
238	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17.167.440,00	0	0	1
239	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17.167.440,00	0	0	1

240	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17.167.440,00	0	0	1
241	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17.167.440,00	0	0	1
242	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17.167.440,00	0	0	1
243	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17.167.440,00	0	0	1
244	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17.167.440,00	0	0	1
245	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17.167.440,00	0	0	1
246	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17.167.440,00	0	0	1
247	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17.167.440,00	0	0	1
248	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17.057.440,00	0	0	1
249	Lap Top (Lap Top)	0	13.226.152,00	1	0	1
250	Lap Top (Laptop)	1	9.990.000,00	0	0	1
251	Lap Top (laptop)	1	7.044.700,00	0	0	1
252	Lap Top (Laptop)	1	9.990.000,00	0	0	1
253	Lap Top (laptop)	1	7.044.700,00	0	0	1
254	Lap Top (laptop)	1	7.044.700,00	0	0	1
255	Lap Top (Laptop)	1	9.990.000,00	0	0	1
256	Lap Top (laptop)	1	7.044.700,00	0	0	1
257	Lap Top (Laptop)	1	9.990.000,00	0	0	1
258	Lap Top (laptop)	1	7.044.700,00	0	0	1
259	Lap Top (laptop)	1	7.044.700,00	0	0	1
260	Lap Top (laptop)	1	7.044.700,00	0	0	1
261	Lap Top (laptop)	1	7.044.700,00	0	0	1
262	Lap Top (laptop)	1	7.044.700,00	0	0	1
263	Lap Top (laptop)	1	7.044.700,00	0	0	1
264	Lap Top (laptop)	1	9.601.000,00	0	0	1
265	Note Book (Note Book)	1	9.287.000,00	0	0	1
266	Note Book (Note Book)	1	7.100.000,00	0	0	1
267	Note Book (Note Book)	1	7.795.000,00	0	0	1

268	Note Book (Laptop)	1	12.342.900,00	0	0	1
269	Note Book (Note Book)	1	7.200.000,00	0	0	1
270	Note Book (Laptop)	1	16.037.700,00	0	0	1
271	Note Book (Note Book)	1	9.287.000,00	0	0	1
272	Note Book (Note Book)	1	7.100.000,00	0	0	1
273	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
274	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
275	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
276	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
277	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
278	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
279	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
280	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
281	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
282	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
283	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
284	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
285	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
286	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
287	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
288	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
289	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
290	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
291	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
292	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
293	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
294	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
295	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1

296	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
297	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
298	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
299	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
300	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
301	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
302	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
303	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
304	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
305	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
306	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
307	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
308	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
309	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
310	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
311	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
312	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
313	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
314	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
315	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
316	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
317	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
318	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
319	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
320	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
321	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
322	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1.500.000,00	0	0	1
323	Printer (Printer)	1	3.243.200,00	0	0	1

DINAS SOSIAL

324	Printer (printer)	1	1.208.000,00	0	0	1
325	Printer (Printer)	1	3.243.200,00	0	0	1
326	Printer (Printer)	1	2.512.300,00	0	0	1
327	Printer (Printer)	0	1.184.500,00	1	0	1
328	Printer (Printer)	1	600.000,00	0	0	1
329	Printer (Printer)	1	1.250.000,00	0	0	1
330	Printer (Printer)	0	3.114.900,00	1	0	1
331	Printer (Print)	1	929.000,00	0	0	1
332	Printer (Printer)	1	1.013.667,00	0	0	1
333	Printer (Printer)	1	3.114.900,00	0	0	1
334	Printer (Printer)	1	600.000,00	0	0	1
335	Printer (Printer Gaji)	1	12.383.000,00	0	0	1
336	Printer (Printer)	1	600.000,00	0	0	1
337	Printer (Printer)	1	1.032.000,00	0	0	1
338	Printer (Printer)	1	1.032.000,00	0	0	1
339	Printer (Printer)	1	600.000,00	0	0	1
340	Printer (Printer)	1	4.644.000,00	0	0	1
341	Printer (Printer)	1	1.800.000,00	0	0	1
342	Printer (printer)	1	6.707.000,00	0	0	1
343	Printer (Printer)	1	1.800.000,00	0	0	1
344	Printer (Print)	1	928.000,00	0	0	1
345	Printer (Printer)	1	1.100.000,00	0	0	1
346	Printer (Printer)	1	1.100.000,00	0	0	1
347	Printer (Printer)	1	1.100.000,00	0	0	1
348	Printer (Printer)	1	5.250.000,00	0	0	1
349	Meja Kerja Pejabat Eselon II (Meja Kerja Eselon II)	1	6.175.000,00	0	0	1
350	Meja Kerja Pejabat Eselon III (Meja Kerja Pejabat Eselon III)	0	2.199.000,00	1	0	1

DINAS SOSIAL

351	Meja Kerja Pejabat Eselon III (Meja Kerja Eselon III)	1	5.660.000,00	0	0	1
352	Meja Kerja Pejabat Eselon III (Meja Kerja Pejabat Eselon III)	1	5.021.000,00	0	0	1
353	Meja Kerja Pejabat Eselon III (Meja Kerja Pejabat Eselon III)	1	2.910.100,00	0	0	1
354	Meja Kerja Pejabat Eselon III (Meja Kerja Eselon III)	1	5.660.000,00	0	0	1
355	Meja Kerja Pejabat Eselon IV (Meja Kerja Pejabat Eselon IV)	1	1.049.000,00	0	0	1
356	Meja Kerja Pejabat Eselon IV (Meja Kerja Pejabat Eselon IV)	1	1.369.613,00	0	0	1
357	Meja Kerja Pejabat Eselon IV (Meja Kerja Pejabat Eselon IV)	1	1.349.200,00	0	0	1
358	Meja Kerja Pejabat Eselon IV (Meja Kerja Eselon IV)	1	3.396.000,00	0	0	1
359	Meja Kerja Pejabat Eselon IV (Meja Kerja Eselon IV)	1	3.396.000,00	0	0	1
360	Meja Kerja Pejabat Eselon IV (Meja Kerja Pejabat Eselon IV)	1	1.049.000,00	0	0	1
361	Meja Kerja Pejabat Eselon IV (Meja Kerja Eselon IV)	1	3.396.000,00	0	0	1
362	Meja Kerja Pejabat Eselon IV (Meja Kerja Eselon IV)	1	3.396.000,00	0	0	1
363	Meja Kerja Pejabat Eselon IV (Meja Kerja Eselon IV)	1	3.396.000,00	0	0	1
364	Meja Kerja Pejabat Eselon IV (Meja Kerja Eselon IV)	1	3.397.000,00	0	0	1
365	Meja Kerja Pegawai Non struktural (meja kerja non struktural)	1	2.012.700,00	0	0	1
366	Meja Kerja Pegawai Non struktural (Meja Kerja Pegawai Non Struktural)	1	2.510.500,00	0	0	1
367	Meja Kerja Pegawai Non struktural (meja kerja non struktural)	1	2.012.700,00	0	0	1
368	Meja Kerja Pegawai Non struktural (Meja Kerja Pegawai Non Struktural)	1	2.510.500,00	0	0	1

DINAS SOSIAL

369	Meja Kerja Pegawai Non struktural (meja kerja non struktural)	1	2.012.700,00	0	0	1
370	Meja Kerja Pegawai Non struktural (meja kerja non struktural)	1	2.012.700,00	0	0	1
371	Meja Kerja Pegawai Non struktural (meja kerja non struktural)	1	2.012.700,00	0	0	1
372	Meja Kerja Pegawai Non struktural (meja kerja non struktural)	1	2.465.500,00	0	0	1
373	Kursi Kerja Pejabat Eselon II (Meja Kerja Eselon II)	1	3.911.000,00	0	0	1
374	Kursi Kerja Pejabat Eselon III (Kursi Kerja Pejabat Eselon III)	1	2.510.000,00	0	0	1
375	Kursi Kerja Pejabat Eselon III (Kursi Eselon III)	1	2.830.000,00	0	0	1
376	Kursi Kerja Pejabat Eselon III (Kursi Eselon III)	1	2.830.000,00	0	0	1
377	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV (Kursi Kerja Pejabat Eselon IV)	1	1.944.000,00	0	0	1
378	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV (Kursi Kerja Eselon IV)	1	2.264.000,00	0	0	1
379	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV (Kursi Kerja Pejabat Eselon IV)	1	1.944.000,00	0	0	1
380	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV (Kursi Kerja Eselon IV)	1	2.264.000,00	0	0	1
381	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV (Kursi Kerja Eselon IV)	1	2.264.000,00	0	0	1
382	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV (Kursi Kerja Eselon IV)	1	2.264.000,00	0	0	1
383	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV (Kursi Kerja Eselon IV)	1	2.264.000,00	0	0	1
384	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV (Kursi Kerja Eselon IV)	1	2.264.000,00	0	0	1
385	Kursi Krja Pegawai Non Struktural (kursi kerja non struktural)	1	805.000,00	0	0	1
386	Kursi Krja Pegawai Non Struktural (Kursi Kerja Pegawai Non Struktural)	1	1.004.218,00	0	0	1

DINAS SOSIAL

387	Kursi Krja Pegawai Non Struktural (Kursi Kerja Pegawai Non Struktural)	1	1.004.214,00	0	0	1
388	Kursi Krja Pegawai Non Struktural (kursi kerja non struktural)	1	805.000,00	0	0	1
389	Kursi Krja Pegawai Non Struktural (kursi kerja non struktural)	1	805.000,00	0	0	1
390	Kursi Krja Pegawai Non Struktural (Kursi Kerja Pegawai Non Struktural)	1	1.004.214,00	0	0	1
391	Kursi Krja Pegawai Non Struktural (Kursi Kerja Pegawai Non Struktural)	1	1.004.214,00	0	0	1
392	Kursi Krja Pegawai Non Struktural (kursi kerja non struktural)	1	805.000,00	0	0	1
393	Kursi Krja Pegawai Non Struktural (kursi kerja non struktural)	1	805.000,00	0	0	1
394	Kursi Krja Pegawai Non Struktural (Kursi Kerja Pegawai Non Struktural)	1	1.004.214,00	0	0	1
395	Kursi Krja Pegawai Non Struktural (Kursi Kerja Pegawai Non Struktural)	1	1.004.214,00	0	0	1
396	Kursi Krja Pegawai Non Struktural (kursi kerja non struktural)	1	805.200,00	0	0	1
397	Kursi Krja Pegawai Non Struktural (Kursi Kerja Pegawai Non Struktural)	1	1.004.214,00	0	0	1
398	Kursi Krja Pegawai Non Struktural (kursi kerja non struktural)	1	1.559.800,00	0	0	1
399	Kursi Krja Pegawai Non Struktural (Kursi Kerja Pegawai Non Struktural)	1	1.004.214,00	0	0	1
400	Kursi Krja Pegawai Non Struktural (Kursi Kerja Pegawai Non Struktural)	1	1.004.214,00	0	0	1
401	Kursi Krja Pegawai Non Struktural (Kursi Kerja Pegawai Non Struktural)	1	1.004.214,00	0	0	1
402	Kursi Krja Pegawai Non Struktural (Kursi Kerja Pegawai Non Struktural)	1	1.004.214,00	0	0	1
403	Kursi Krja Pegawai Non Struktural (Kursi Kerja Pegawai Non Struktural)	1	1.004.214,00	0	0	1
404	Kursi Krja Pegawai Non Struktural (Kursi Kerja Pegawai Non Struktural)	1	1.004.214,00	0	0	1

DINAS SOSIAL

405	Kursi Krja Pegawai Non Struktural (Kursi Kerja Pegawai Non Struktural)	1	1.004.214,00	0	0	1
406	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II (Kursi Tamu)	1	9.982.000,00	0	0	1
407	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II (Kursi Tamu)	1	9.983.000,00	0	0	1
408	Lain-lain (Kursi Rapat)	1	514.000,00	0	0	1
409	Lain-lain (Kursi Rapat)	1	514.000,00	0	0	1
410	Lain-lain (Kursi Rapat)	1	514.000,00	0	0	1
411	Lain-lain (Kursi Rapat)	1	514.000,00	0	0	1
412	Lain-lain (Kursi Rapat)	1	514.000,00	0	0	1
413	Lain-lain (Kursi Rapat)	1	515.000,00	0	0	1
414	Lain-lain (Kursi Rapat)	1	515.000,00	0	0	1
415	Lain-lain (Kursi Rapat)	1	515.000,00	0	0	1
416	Lain-lain (Kursi Rapat)	1	515.000,00	0	0	1
417	Lain-lain (Kursi Rapat)	1	515.000,00	0	0	1
418	Lain-lain (Kursi Rapat)	1	515.000,00	0	0	1
419	Lemari Arsip Tinggi (Almari Arsip)	1	3.293.000,00	0	0	1
420	Lemari Arsip Tinggi (Almari Arsip)	1	3.293.000,00	0	0	1
421	Lemari Arsip Tinggi (Almari Arsip)	1	3.293.000,00	0	0	1
422	Lemari Arsip Tinggi (Almari Arsip)	1	3.294.000,00	0	0	1
423	Meja Kerja Staf (Meja Kerja Staf)	1	3.341.000,00	0	0	1
424	Meja Kerja Staf (Meja Kerja Staf)	1	3.341.000,00	0	0	1
425	Meja Kerja Staf (Meja Kerja Staf)	1	3.341.000,00	0	0	1
426	Meja Kerja Staf (Meja Kerja Staf)	1	3.341.000,00	0	0	1
427	Meja Kerja Staf (Meja Kerja Staf)	1	3.342.000,00	0	0	1
428	Meja Kerja Staf (Meja Kerja Staf)	1	3.342.000,00	0	0	1
429	Meja Kerja Staf (Meja Kerja Staf)	1	3.342.000,00	0	0	1
430	Meja Kerja Eselon V (Meja Kerja Eselon IV)	1	3.718.000,00	0	0	1
431	Meja Kerja Eselon V (Meja Kerja	1	3.718.000,00	0	0	1

DINAS SOSIAL

	Eselon IV)					
432	Meja Kerja Eselon V (Meja Kerja Eselon IV)	1	3.719.000,00	0	0	1
433	Kursi Staff (Kursi Staff)	1	1.344.000,00	0	0	1
434	Kursi Staff (Kursi Staff)	1	1.344.000,00	0	0	1
435	Kursi Staff (Kursi Staff)	1	1.344.000,00	0	0	1
436	Kursi Staff (Kursi Staff)	1	1.344.000,00	0	0	1
437	Kursi Staff (Kursi Staff)	1	1.344.000,00	0	0	1
438	Kursi Staff (Kursi Staff)	1	1.343.000,00	0	0	1
439	Kursi Staff (Kursi Staff)	1	1.343.000,00	0	0	1
440	Kursi Staff (Kursi Staff)	1	1.343.000,00	0	0	1
441	Kursi Staff (Kursi Staff)	1	1.343.000,00	0	0	1
442	Kursi Kerja Eselon IV (Kursi Kerja Eselon IV)	1	2.688.000,00	0	0	1
443	Kursi Kerja Eselon IV (Kursi Kerja Eselon IV)	1	2.687.000,00	0	0	1
444	Kursi Kerja Eselon IV (Kursi Kerja Eselon IV)	1	2.687.000,00	0	0	1
445	Camera + Attachmen (Camera + Attachmen)	1	8.500.000,00	0	0	1
446	LCD Proyektor (LCD Projector)	1	11.961.200,00	0	0	1
447	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	199.588.000,00	0	0	1
448	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	198.515.000,00	0	0	1
449	Lain-lain	1	20.000.000,00	0	0	1
450	Lain-lain	1	204.279.900,00	0	0	1
451	Jalan Khusus Kompleks	1	227.773.000,00	0	0	1
452	Lain-lain	1	34.159.000,00	0	0	1
453	Lain-lain	1	205.965.500,00	0	0	1
454	Station Wagon (Station Wagon)	1	259.380.000,00	0	0	1
455	Lain-lain	1	4.949.334.000,00	0	0	1

3. Pembiayaan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lamongan berdasarkan perincian pembiayaan yang terdapat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 , adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH	KET.
I.	Belanja Daerah	Rp. 7.756.377.940,-	
1.	<u>Belanja Operasi</u>	Rp. 7.709.281.940,-	
	a. Belanja Pegawai	Rp. 3.322.078.940,-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.854.803.000,-	
	c. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 2.532.400.000,-	
2.	<u>Belanja Modal</u>		
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 47.096.000,-	
		Rp. 47.096.000,-	

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

Sistematika pelaporan Laporan Kinerja (LKj) mengacu pada format yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) yang mengacu Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014. Secara umum penyusunan Laporan Kinerja

mengikuti prinsip–prinsip kejujuran, obyektif, akurat dan transparan. Format Laporan Kinerja terdiri dari:

- Ringkasan Eksekutif Dalam bagian ini secara umum disajikan tentang tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, sejauhmana Dinas telah mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kendala–kendala yang dihadapi dan langkah– langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.
- Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- Perencanaan dan Perjanjian Kerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/iktisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- Akuntabilitas Kinerja
 - A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :
 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

- Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- Lampiran
 - a. Matriks Renstra
 - b. Perjanjian Kinerja
 - c. Ringkasan Pengukuran Kinerja
 - d. Lampiran lainnya, penghargaan dll.

SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan memahami substansi LKJIP Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2021, Sistematika pelaporan Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai berikut :

Executive Summary, pada bagian ini diuraikan tentang intisari substansi dari setiap bagian dari Renstra ini.

BAB. I : **Pendahuluan**, pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang; Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi; Data Umum Organisasi yang meliputi : Personil, Sarana dan Prasarana, Pembiayaan; Sistematika Penyajian LKJIP, Sistematika Penulisan.

BAB. II : **Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**, pada bagian ini diuraikan tentang Rencana Strategis yang meliputi : Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran; Rencana Kinerja Tahun 2021 meliputi : program dan kegiatan; Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

BAB. III : **Akuntabilitas Kinerja**, pada bagian ini diuraikan tentang Capaian Kinerja Organisasi yang meliputi : Pencapaian Kinerja, Perbandingan Realisasi Kinerja, Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA, Perbandingan Realisasi

Kinerja dengan Realisasi Nasional, Analisis Penyebab Keberhasilan yang telah dilakukan, Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja; Realisasi Anggaran.

BAB. IV : **Penutup**, pada bagian ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Matriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2016-2021
- Perjanjian Kinerja Staf Tahun 2021
- Pengukuran Kinerja 2021

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Visi dan Misi

Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana suatu organisasi diarahkan. Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal masa depan yang ingin diwujudkan. Visi merupakan arah langkah kedepan dengan penuh kepastian. Visi merupakan gambaran konseptual tentang hari depan yang ingin diwujudkan dan mampu memberikan semangat dalam menjalankan roda organisasi.

Bertumpu pada konsep visi tersebut, Kabupaten Lamongan menetapkan visi **“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing“**

Visi Kabupaten Lamongan tersebut, tidak akan bisa terwujud tanpa adanya dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Karenanya setiap OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan harus pula menetapkan visi yang seiring dan sejalan dengan visi Kabupaten Lamongan.

Keunggulan ini dapat diwujudkan dengan mempersyaratkan adanya potensi dan kompetensi untuk bisa lebih produktif, memiliki daya kreatif dan inovatif yang tinggi sesuai tuntutan lingkungan strategi yang senantiasa terus mengalami perubahan dan tumbuh kembang yang semakin dinamis dan komplek. Lebih produktif berarti menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan, dan memiliki daya kreasi dan inovasi produk secara berkelanjutan yang tinggi, serta memiliki daya saing, baik daya saing komparatif maupun daya saing manfaat (*comparative and advantage competitive*) untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Lamongan menjadi masyarakat yang sejahtera dari segi ekonomi, serta rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat yang dilandasi dengan meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, ketaqwaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berkembangnya kehidupan demokrasi dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat.

Kompetensi ini merupakan kemampuan yang berupa pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan, sikap dan perilaku serta etika yang diperlukan untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan peran yang dimainkannya. Karenanya menuntut adanya "Sense of responsibility and professionally" dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan peran masing-masing. Sense of responsibility, menghendaki setiap pelaku kepentingan memiliki rasa bertanggung jawab, yakni mau dan mampu bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan segala sikap, perilaku, tindakan dalam bingkai melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang diamanahkan kepadanya. Sementara professionally lebih mengarah pada kompetensi bagi setiap pelaku kepentingan. Kompetensi merupakan kemampuan yang berupa pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya.

Misi

Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Visi dapat terwujud apabila Instansi Pemerintah mempunyai misi yang jelas sehingga pada gilirannya dapat menyelaraskan dengan potensi masalah dan kendala yang dihadapi.

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Lamongan maka dirumuskan dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :

Misi ke-1

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan;

Misi ke-2

Mengembangkan Perekonomian Yang Berdaya Saing Dengan
Menoptimalkan Potensi Daerah;

Misi ke-3

Memantapkan Sarana Dan Prasarana Dasar Dengan Menjaga Kelestarian
Lingkungan;

Misi ke-4

Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.

Misi ke-5

Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan
menjunjung tinggi budaya lokal;

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kab. Lamongan adalah Misi ke-5 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 yaitu *Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal*. Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-5 ditetapkan tujuan : *“Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran”* serta sasaran ke-1. Sasaran strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Sosial Kab. Lamongan adalah

Sasaran ke-1

Meningkatkan pelayanan dan bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS.

1. Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, perlu ditetapkan tujuan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan

terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagaimana berikut :

“Meningkatkan Pelayanan dan Bantuan Sosial dalam Upaya Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).“

2. Sasaran dan Indikator Kinerja

Untuk mewujudkan keempat tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan selama kurun waktu jangka menengah lima tahun, maka perlu ditetapkan sasaran sesuai dengan sebagai berikut :

- ❖ Untuk mencapai tujuan “Meningkatnya pelayanan dan Bantuan Sosial dalam Upaya Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) “ ditetapkan sasaran :
 - a) Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, dengan indikator : Persentase PMKS yang meningkat kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya;
 - b) Meningkatnya kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dengan indikator :
 1. Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang berkompeten;
 2. Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Rencana Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lamongan untuk Tahun 2021 berpedoman dari Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021.

RKA (Rencana Kerja Anggaran) disusun mengacu kepada klasifikasi anggaran yaitu belanja Daerah menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Jadi RENJA memuat rencana capaian kinerja dari Renstra yang bersifat tahunan, yaitu target-target kinerja output dari setiap kegiatan, target outcome dari setiap sasaran dalam mendukung tujuan.

Rencana Kinerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan untuk tahun 2021, disajikan di dalam Format Rencana Kinerja (RENJA).

Terkait dengan rencana kinerja tahunan, supaya rencana/target capaian kinerja yang tercantum di dalam Rencana Kinerja Tahunan dapat terukur, maka disusun indikator kinerja yaitu indikator output dan outcome yang disusun sesuai dengan alokasi anggaran kegiatan berdasarkan DPA Awal tahun 2021.

Komponen Rencana Kinerja Tahunan pada Tahun 2021 yang disusun berdasarkan Renstra secara rinci memuat tentang tujuan, program, sasaran / kegiatan, output dan indikator output, serta outcome dan indikator outcome.

Penetapan indikator kinerja kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus dikelola. Penetapan indikator kinerja dimaksudkan untuk dapat menggambarkan kinerja sasaran dan kegiatan yang hendak dicapai sebagai target capaian kinerja. Dengan demikian, indikator kinerja tersebut diupayakan memiliki kriteria spesifik dan jelas, dapat diukur secara obyektif, layak dicapai, serta relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu tertentu.

Di dalam Rencana Kinerja pada Tahun 2021, indikator kinerja yang dikembangkan dan disepakati untuk pengukuran capaian kinerja adalah indikator output dan outcome dan diuraikan berdasarkan kegiatan dan sasaran serta target kuantitatif atau kualitatifnya.

Indikator outcome yang ditetapkan akan dicapai dan dapat diukur pada akhir tahun anggaran berjalan. Indikator output ditetapkan pertahun berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari masing-masing kegiatan. Kinerja Dinas Sosial juga merupakan agregasi dari kinerja masing-masing bidang yang berasal dari agregasi dari kinerja masing-masing bidang yang berada di bawahnya dalam melaksanakan tupoksinya untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran dalam Renstra.

Program dan Kegiatan

Urusan Sosial di Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2021 dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan melalui 9 (tujuh) Program dan 16 (enam belas) Kegiatan serta 59 (lima puluh sembilan) Sub Kegiatan, adapun program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, membawahi :
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
 - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 1.3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- 1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 1.4.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 1.4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 1.4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 1.4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 1.5.1. Pengadaan Mebel;
 - 1.5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 1.6.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
 - 1.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 1.7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 1.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

2. Program Pemberdayaan Sosial:

1.

2.

2.0.

2.1. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota;

2.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian
Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau
Barang;

2.2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/Kota;

2.2.1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;

2.2.2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan
Kabupaten/Kota;

2.2.3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota

2.2.4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota

2.2.5. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia
dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga (LK3)

3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan:

3.

3.0.

3.1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota Untuk
dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal;

3.1.1. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;

4. Program Rehabilitas Sosial:

4.

4.0.

4.1. Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;

4.1.1. Penyediaan Permakanan;

4.1.2. Penyediaan Sandang;

4.1.3. Penyediaan Alat Bantu;

4.1.4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;

4.1.5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial;

4.1.6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat;

4.1.7. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak;

4.1.8. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;

4.1.9. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;

4.1.10. Pembelian Layanan Kedaruratan;

4.1.11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;

4.1.12. Pemberian Layanan Rujukan;

4.2. Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;

- 4.2.1. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;
- 4.2.2. Pemberian Layanan Kedaruratan;
- 4.2.3. Penyediaan Permakanan;

5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial:

5.

5.0.

5.1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar;

5.1.1. Rujukan Anak-Anak Terlantar;

5.1.2. Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar;

5.2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;

5.2.1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;

5.2.2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;

5.2.3. Fasilitas Bantuan Sosial Kekeluargaan

5.2.4. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;

6. Program Penanganan Bencana:

6.

6.0.

6.1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota;

6.1.1. Penyediaan Makanan;

6.1.2. Penyediaan Sandang;

6.1.3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

6.1.4. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

6.1.5. Pelayanan Dukungan Psikososial

6.2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

6.2.1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

6.2.2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Taruna Bencana

7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan:

7.

7.0.

7.1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;

7.1.1. Rehabilitas Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;

7.1.2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

7.1.3. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, serta merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan, untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi. Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi ;
2. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur ;
3. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah ;

4. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi ;
5. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur ;
6. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam LKjIP .

Dokumen Perjanjian Kinerja ini disusun setelah ada kejelasan mengenai alokasi anggaran. Hal ini dimaksudkan agar dokumen perjanjian kinerja dapat disusun secara realistis dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber dana yang nyata dana dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya, Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2021.



REKAP PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PK KEPALA DINAS SOSIAL			
	1.1 Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	1. Prosentase PMKS yang meningkat kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya	3,61 %	
	1.2 Meningkatnya kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (KS)	1. Prosentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang berkompeten	100 %	
		2. Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (KS)	100 %	
2	PK SEKRETARIS			
	Tercapainya pelayanan pada unit kerja internal dengan baik	Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	
	PK KASUBAG PERENCANAAN DAN			

	EVALUASI			
	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 dokumen	
	Tersusunnya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan yang tersusun	7 laporan	
	PK KASUBAG KEUANGAN			
	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	25 orang	
	Terlaksananya penyusunan laporan akhir tahun	Jumlah laporan akhir tahun	3 laporan	
	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Jumlah laporan laporan KIB dan laporan barang pengguna bulanan, laporan keuangan bulanan, jumlah laporan semesteran	2 dokumen; 12 laporan; 2 laporan	
4	PK KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN			
	Terlaksananya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Prosentase fakir miskin yang diberdayakan sehingga dapat mandiri	100%	
4.1	PK KASI BANTUAN STIMULAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN			
	4.1.1 Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah pelaksanaan bantuan pangan bagi keluarga miskin	0	Anggaran terkena refocusing untuk penanganan covid-19
4.2	PK KASI PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN			
	4.2.1 Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah pelaksanaan bantuan pangan bagi keluarga miskin	1 kube fakmis	
4.3	PK KASI IDENTIFIKASI DAN PENGUATAN KAPASITAS			
	4.3.1 Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaporan pendataan PMKS	4 kali penyaluran	
	4.3.2 Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah pelaksanaan bantuan pangan bagi keluarga miskin	12 penyaluran	

5	PK KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL			
	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	
5.1	PK KASI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA			
	5.1.1 Terpenuhinya penyediaan sandang	Jumlah anak asuh keluarga miskin yang diberdayakan	80 anak	
	5.1.2 Terpenuhinya Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah orang yang mendapatkan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	10 orang	
	5.1.3 Terlaksananya Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	10 orang	
	5.1.4 Terpenuhinya pemberian layanan rujukan	Jumlah orang yang mendapat layanan rujukan	10 orang	
5.2	PK KASI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG			
	5.2.1 Terlaksananya pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah WTS, gepeng dan gelandangan psikotik yang terjaring razia yang dipulangkan/dikirim ke Panti Rehabilitasi Sosial	30 orang	
	5.2.2 Terlaksananya pemberian layanan data dan pengaduan	Jumlah orang yang mendapat layanan data dan pengaduan	5 orang	
	5.2.3 Terlaksananya Pemberian layanan kedaruratan	Jumlah WTS, gepeng dan gelandangan psikotik yang terjaring razia yang dipulangkan/dikirim ke Panti Rehabilitasi Sosial	6 orang	
	5.2.4 Terlaksananya Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan penampungan sementara	30 orang	
5.3	PK KASI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS			
	5.3.1 Terpenuhinya	Jumlah Eks Pasung yang	10 orang	

	Penyediaan Permakanaan	diberdayakan		
	5.3.2 Terpenuhinya Penyediaan Alat Bantu	Jumlah warga disabilitas yang mendapat alat bantu	5 orang	
	5.3.3 Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah penyandang cacat yang mendapat bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan	10 orang	
	5.3.4 Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Eks Kusta yang mendapat bimbingan sosial	10 orang	
6	PK KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL			
	6.1.1 Terlaksananya Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	
	6.1.2 Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase PSKS Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	100 %	
	6.1.3 Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti	Prosentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial yang direhabilitasi sosial	100 %	
	6.1.4 Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional kabupaten/Kota	Prosentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang dipelihara	100 %	

6.1	PK KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN SOSIAL			
	6.1.1 Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Jumlah penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	5 rekomendasi	
	6.1.2 Terlaksananya Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah peserta bimtek dan diklat pengurus LKS; jumlah karang taruna yang dibina dan direvitalisasi	81 orang	
	6.1.3 Terlaksananya Penyediaan permakanan	Jumlah panti asuhan yang mendapat fasilitas dan diberdayakan	33 LKS	
6.2	PK KASI PEMBERDAYAAN PERORANGAN DAN KELUARGA			
	6.2.1 Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang diberdayakan	54 Orang	
	6.2.2 Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang dibina	27 Orang	
	6.2.3 Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Jumlah FCU yang dibina	27 kec	
	6.2.4 Terlaksananya Pemberian layanan data dan pengaduan	Jumlah pelaporan data PSKS	1 laporan	
6.3	PK KASI PEMBERDAYAAN POTENSI KESETIAKAWANAN & RESTORASI SOSIAL			
	6.3.1 Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah veteran pejuang kemerdekaan, janda pahlawan dan warakawuri yang mendapat tali asih	55 Orang	

	6.3.2 Terlaksananya Rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana pemakaman yang terpelihara	1 TMP	
	6.3.3 Terlaksananya Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana pemakaman yang terpelihara	1 TMP	
7	PK KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
	7.1 Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Prosentase pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan	100 %	
	7.2 Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti	Prosentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial yang direhabilitasi sosial	100 %	
	7.3 Terlaksananya Pemeliharaan anak-anak terlantar	Prosentase anak terlantar yang terpelihara	100 %	
	7.4 Terlaksananya Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Prosentase data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang dikelola	100 %	
	7.5 Terlaksananya Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	
	7.6 Terlaksananya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapan bencana kabupaten/kota	Prosentase pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	100 %	
7.1	PK KASI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA			

DINAS SOSIAL

	ALAM			
	7.1.1 Terpenuhinya penyediaan makanan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Cadangan Beras Pemerintah dan Barang Bencana	1 kali penyaluran (27 Kecamatan)	
	7.1.2 Terpenuhinya penyediaan sandang	Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapat Bantuan	10 Orang	
	7.1.3 Terpenuhinya Penyedia Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Penampungan yang disediakan Bagi Korban Bencana	1 Desa	
	7.1.4 Terlaksananya Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Kelompok Rentan yang Mendapat Penanganan Khusus	1 Kelompok	
	7.1.5 Terlaksananya Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Orang yang dapat Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana	40 Orang	
	7.1.6 Terlaksananya Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah TAGANA Siap Menanggulangi Bencana	5 Orang	
	7.1.7 Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah TAGANA Siap Menanggulangi Bencana	40 Orang	
7.2	PK KASI JAMINAN SOSIAL KELUARGA			
	7.2.1 Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pendataan JKN	27 kec	
	7.2.2 Terlaksananya Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pelaksanaan PKH	4 kali pelaksanaan	
7.3	PK KASI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL			
	7.3.1 Terlaksananya Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah korban bencana sosial yang mendapat bantuan	50 Orang	

DINAS SOSIAL

	7.3.2 Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang Terlantar	40 Orang	
--	---	------------------------	----------	--

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Hasil pengukuran kinerja terhadap 9 Program (meliputi 4 Program Pembangunan dan 5 Program Rutin) dan 38 kegiatan (meliputi 25 kegiatan pembangunan dan 13 kegiatan yang termasuk ke dalam kegiatan rutin) sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021, menunjukkan bahwa secara umum Dinas Sosial Kabupaten Lamongan telah mencapai kinerja, baik terkait pelaksanaan pembangunan dibidang Sosial. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, maka penetapan indikator-indikator kinerja serta rencana pencapaiannya dilakukan sejak awal perencanaan program dan kegiatan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dari setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasi yang dicapai oleh indikator kinerja tersebut, sehingga diketahui selisih kinerjanya (performance gap). Berdasarkan performance gap tersebut, dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Dalam proses pengukuran kinerja tersebut, diperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) jenis skala penilaian pengukuran yang masing-masing terdiri dari 4 (empat) kategori sebagai berikut :

- a. Untuk pengukuran realisasi indikator sasaran, skala penilaiannya :

NO	PERSENTASE CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	Lebih dari 95 %	Sangat Baik
2	75 % sampai 95 %	Baik
3	55 % sampai 75 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

- b. Untuk mengukur capaian kinerja indikator sasaran, skala penilaiannya :

NO	PERSENTASE CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	Lebih dari 95 %	Sangat Baik
2	75 % sampai 95 %	Baik
3	55 % sampai 75 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

A.1 PERCAPAIAN KINERJA

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan : Meningkatkan pelayanan dan bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS

Sasaran : 1. Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya;
2. Meningkatnya kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (KS).

A.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

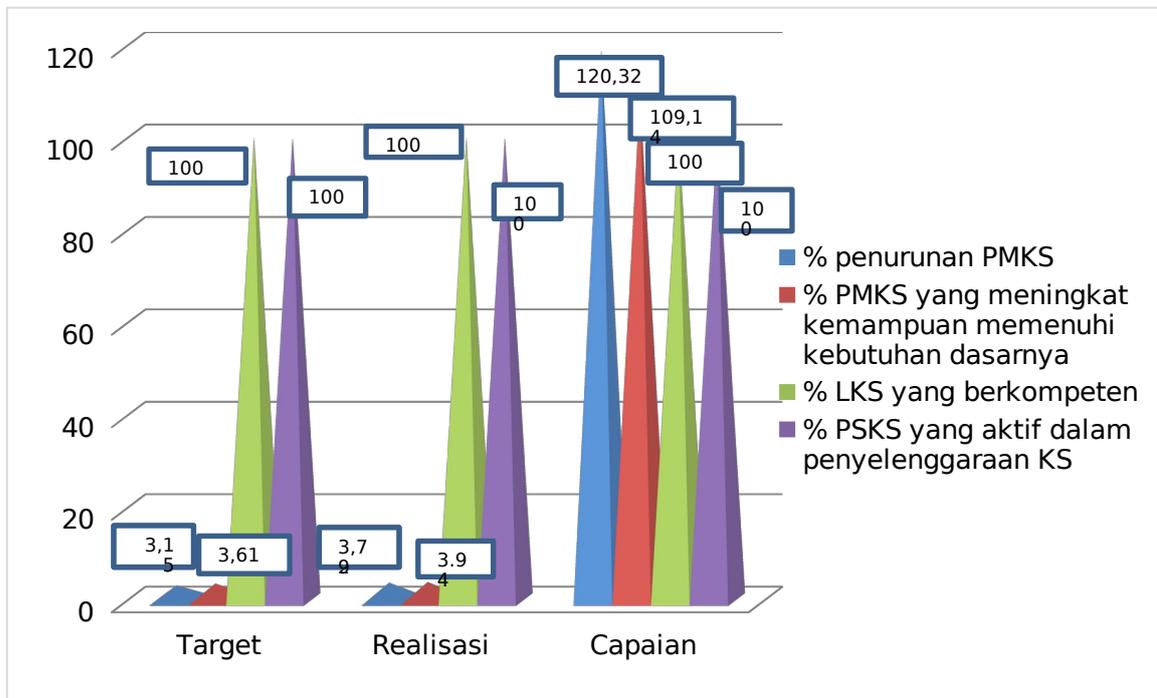
Analisis pengukuran capaian kinerja dilakukan melalui:

Perbandingan antara target, realisasi dan capaian kinerja tahun 2020. Sesuai Lembar Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah disepakati dengan uraian sebagai berikut:

Tabel A.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
A. TUJUAN : Meningkatkan pelayanan dan bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS	% penurunan PMKS	3,15 %	3,79 %	120,32 %
B. SASARAN : 1. Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	1. % PMKS yang meningkat kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya	3.61 %	3,94 % 4.900 124.519	109,14%
2. Meningkatnya kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (KS)	2. % LKS yang berkompeten	100 %	100 %	100 %
	3. % PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100 %	100% (865)	100%

Grafik A.2.1
Perbandingan Realisasi Kinerja



1. Capaian kinerja tujuan tahun 2021 menunjukkan angka 120,32% dengan realisasi 3,79% atau Sangat Baik melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,15%, bila dibandingkan dengan capaian kinerja 2020 sebesar 119,02% dengan realisasi 3,63%, maka realisasi kinerja tahun 2021 naik 1,3% artinya semakin tinggi realisasinya berarti prosentase penurunan PMKS semakin cepat (progress positif). Hal ini terbukti bahwa jumlah PMKS yang tertangani semakin menurun jumlahnya yaitu tahun 2020 sebanyak 129.419 jiwa dan pada tahun 2021 menurun 124.519 jiwa.
2. Indikator PMKS yang meningkat kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya terealisasi 3,94% dari yang ditargetkan 3,61% dengan capaian 109,14%, hal tersebut dikarenakan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2021 sebanyak 124.519 jiwa atau menurun 4.900 jiwa dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 sebanyak 129.419 jiwa :

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) :

N O	JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	JUMLAH
1	2	6
1	Keluarga Fakir Miskin	34.013
2	Anak Jalanan	-
3	Tuna Susila *	49
4	Pengemis	25
5	Gelandangan & Gelandangan Psikotik	-
6	Anak Balita Terlantar	1
7	Anak Terlantar	10.152
8	Anak Berhadapan Dengan Hukum	3
9	Anak Dengan Kedisabilitas	-
	a Tubuh	50
	b Netra	13
	c Cacat Wicara	19
	d Mental	66
	e Cacat Ganda	64
10	Anak Yang menjadi Korban Tindak kekerasan atau diperlakukan salah	22
11	Anak Yang Memerlukan perlindungan Khusus.	-
12	Lanjut Usia Terlantar	8.422
13	Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis	-
	a Tubuh	1.365
	b Netra	739

	c Cacat Wicara	305
	d Mental	1.566
	e Cacat Ganda	1.178
	f Penderita Penyakit Kronis	14.996
14	Pemulung	637
15	Kelompok Minoritas	-
16	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	-
17	Orang dengan HIV /AIDS (ODHA)	1.471
18	Korban Penyalahgunaan Napza	-
19	Korban Trafficking	-
20	Korban Tindakan Kekerasan atau yang Diperlakukan Salah	
	a Wanita	-
	b Laki-laki	-
	c Lanjut Usia	-
21	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	-
22	Korban bencana Alam	49.323
23	Korban Bencana Sosial	40
24	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-
26	Masyarakat Daerah Tertinggal dan Terpencil	-
	JUMLAH	124.519

3. Indikator “LKS yang berkompeten” dengan target 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%. Tercapai 33 pantai dari target 33 panti.
4. Indikator “PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial” terealisasi 100 % dari yang ditargetkan 100% dengan capaian 100%, hal ini dikarenakan PSKS yang mampu meningkatkan potensinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terlihat dengan turunnya PPKS di tahun 2021.

A.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA s/d AKHIR PERIODE RPJMD/RENSTRA

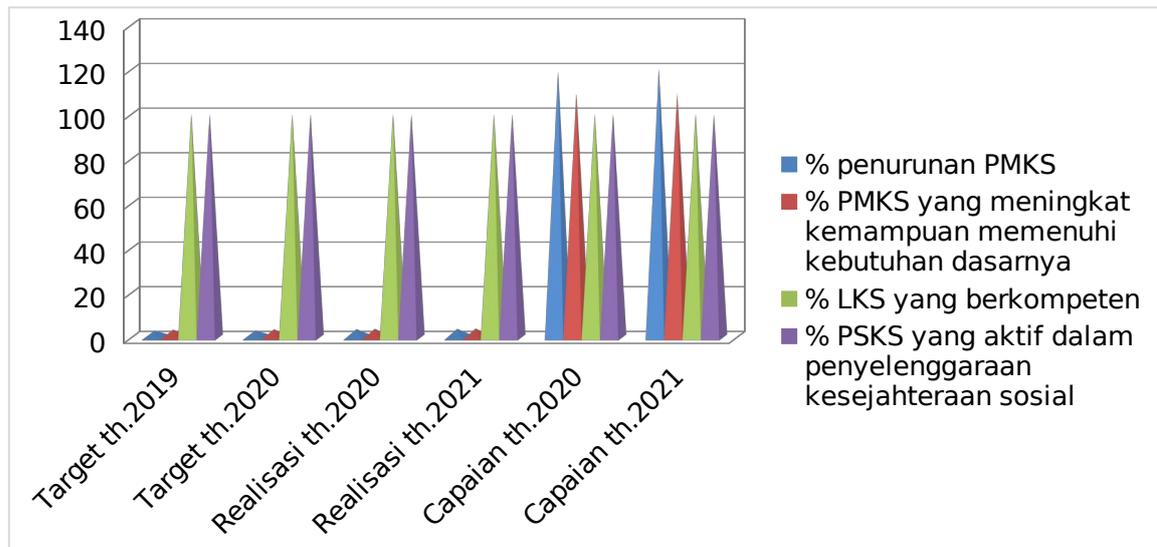
Analisis pengukuran capaian kinerja dilakukan melalui:

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020 dan 2021. Sesuai Lembar Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan 2021 yang telah disepakati dengan uraian sebagai berikut:

Tabel A.3
Perbandingan Realisasi Kinerja
s/d Akhir Periode RPJMD/ RENSTRA

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
		Th. 2020	Th. 2021	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2020	Th. 2021
A. TUJUAN :							
Meningkatkan pelayanan dan bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS	% penurunan PMKS	3,05%	3,15 %	3,63%	3,79 %	119,02%	120,32 %
B. SASARAN :							
1. Meningkatkan kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	1. % PMKS yang meningkat kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya	3,45%	3.61 %	3,77%	3,94 %	109,28%	109,14%
2. Meningkatnya kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (KS)	2. % LKS yang berkompeten	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %
	3. % PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	100 %	100%	100%	100%	100%

Grafik A.3.1
Perbandingan Realisasi Kinerja
s/d Akhir Periode RPJMD/ RENSTRA



1. Indikator “LKS yang berkompeten” dengan target 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%. Tercapai 33 pantai dari target 33 panti.
2. Capaian Indikator PMKS yang meningkat kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya di tahun 2021 terealisasi 3,94% dari yang ditargetkan 3,61% dengan capaian 109,14%. Adapun di tahun 2020 realisasi 3,77% dari yang ditargetkan 3,45% dengan capaian 109,28 % mengalami peningkatan jumlah PMKS yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya artinya jumlah PMKS tahun 2021 sebanyak 124.519 jiwa turun 4.900 jiwa jika dibandingkan tahun lalu jumlah PPKS 129.419 jiwa.
3. Indikator “PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial” terealisasi 100 % dari yang ditargetkan 100% dengan capaian 100%.
4. Perbandingan capaian kinerja tujuan tahun 2021 menunjukkan angka 120,32% dengan realisasi 3,79% lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 3,63% dengan capaian 119,02%. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan realisasi 1,3% atau penurunan PPKS sebesar 4.900 jiwa dimana tahun 2021 jumlah PPKS sebanyak 124.519 jiwa turun jika dibandingkan tahun lalu jumlah PPKS yang tertangani 129.419 jiwa .

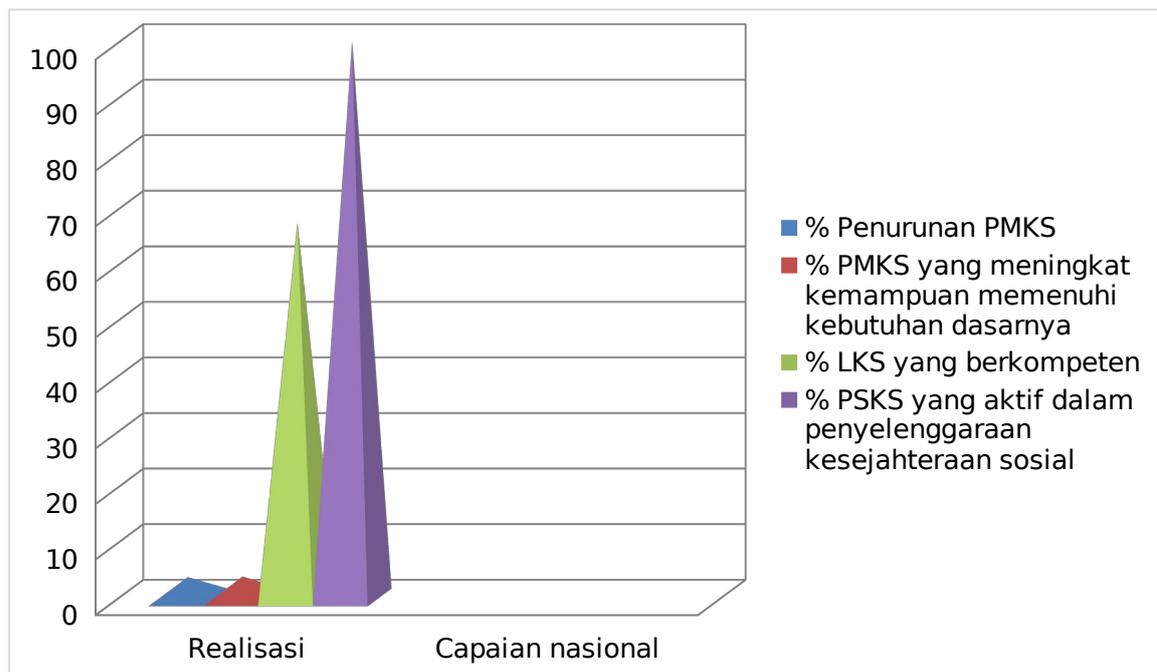
A.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL

Tabel A.4
Perbandingan Realisasi Kinerja
Dengan Realisasi Nasional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Realisasi		Capaian	
			2021	Nasional	2021	Nasional
Tujuan : 1 . Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	1.	% PMKS yang meningkat kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya	3,79 %		120,32 %	
Sasaran : 1 . Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	1.	% PMKS yang meningkat kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya	3,94 %		109,14%	
2. Meningkatnya kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (KS)	1.	% LKS yang berkompeten	100 %		100 %	
	2.	% PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100 %		100 %	

Grafik A.4.1

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional



Capaian kinerja pada indikator di atas tidak dapat diperbandingkan dengan capaian Nasional, PMKS yang Tertangani, mengingat terdapat perbedaan indikator. sarana sosial yang memberikan pelayanan layak dan Pemberdayaan PSKS Nasional tidak memiliki indikator dimaksud.

A.5 Analisis penyebab keberhasilan yang telah dilakukan

Adanya kenaikan realisasi tujuan Dinsos 1,3% dari tahun sebelumnya dimana tahun 2021 realisasi sebesar 3,79% dan ditahun 2020 sebesar 3,63%. Kenaikan ini berada pada :

1. Bidang Rehabilitasi Sosial, Program Rehabilitasi Sosial melebihi target yang telah ditentukan, dimana capaian 111,67% dari target program 100%.
2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan Operasional Cadangan Beras Pemerintah dan Beras Bencana. Dimana, korban bencana alam banjir sebanyak 49.323 jiwa dan korban bencana sosial sebanyak 40 jiwa konflik sosial mamuju.

A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari sisi personil, terdapat 4 bidang dimana ada 4 Kabid 12 Kasi 2 Staf PNS dan 8 Tenaga Kontrak yang menangani, hal ini masih kurang dikarenakan jumlah staf 22 orang karena sesuai anjab seharusnya membutuhkan staf 36 orang.

A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Pencapaian Kinerja

Sebagai penunjang keberhasilan dan pencapaian kinerja Bidang Sosial di Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2020 dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan melalui 9 (sembilan) Program dan 38 (empat puluh delapan) Kegiatan, adapun program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, membawahi :
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
 - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 1.3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- 1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 1.4.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 1.4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 1.4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- 1.4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 1.5.1. Pengadaan Mebel;
 - 1.5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 1.6.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
 - 1.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 1.7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 1.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

2. Program Pemberdayaan Sosial:

- 2.1. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang;
- 2.2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2.2.1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 2.2.2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 2.2.3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2.2.4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2.2.5. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan:
 - 3.1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota Untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal;
 - 3.1.1. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
4. Program Rehabilitas Sosial:
 - 4.1. Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;

- 4.1.1. Penyediaan Permakanan;
- 4.1.2. Penyediaan Sandang;
- 4.1.3. Penyediaan Alat Bantu;
- 4.1.4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
- 4.1.5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial;
- 4.1.6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat;
- 4.1.7. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak;
- 4.1.8. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
- 4.1.9. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;
- 4.1.10. Pembelian Layanan Kedaruratan;
- 4.1.11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
- 4.1.12. Pemberian Layanan Rujukan;
- 4.2. Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
 - 4.2.1. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;
 - 4.2.2. Pemberian Layanan Kedaruratan;
 - 4.2.3. Penyediaan Permakanan;
- 5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial:
 - 5.1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar;
 - 5.1.1. Rujukan Anak-Anak Terlantar;
 - 5.1.2. Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar;
 - 5.2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;

- 5.2.1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5.2.2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5.2.3. Fasilitas Bantuan Sosial Kekeluargaan
 - 5.2.4. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
6. Program Penanganan Bencana:
- 6.1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota;
 - 6.1.1. Penyediaan Makanan;
 - 6.1.2. Penyediaan Sandang;
 - 6.1.3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - 6.1.4. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 - 6.1.5. Pelayanan Dukungan Psikososial
 - 6.2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - 6.2.1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 - 6.2.2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Taruna Bencana
7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan:
- 7.1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;
 - 7.1.1. Rehabilitas Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;
 - 7.1.2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - 7.1.3. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

B. REALISASI ANGGARAN

Program dan Kegiatan yang terealisasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dalam rangka pengembangan bidang sosial pada tahun 2021 dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 7.756.377.940,- dan realisasi sebesar Rp.7.223.051.273 ,- atau 93,12 % dan capaian target kinerja 120,32 %.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	SOSIAL	7.756.377.940	7.223.051.273	93,12%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.295.877.940	3.925.041.473	91,37%
1.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000	79.629.000	99,54%
1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000	100,00%
1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.000.000	64.629.000	99,43%
1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.356.478.940	3.103.377.230	92,46%
1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.316.478.940	3.063.435.790	92,37%
1.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	14.966.400	99,78%
1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25.000.000	24.975.040	99,90%
1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0
1.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0
1.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0
1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.000.000	68.242.600	90,99%
1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	7.990.100	99,88%
1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000	7.996.600	99,96%
1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.000.000	18.583.100	97,81%
1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	14.900.000	99,33%
1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	10.330.000	68,87%
1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000	8.442.800	84,43%
1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.500.000	47.500.000	100,00%
1.2.07.05	Pengadaan Mebel	0	0	0
1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.500.000	47.500.000	100,00%
1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	586.899.000	508.925.143	86,71%
1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.927.000	36.594.107	53,87%
1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	14.931.800	99,55%
1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	503.972.000	457.399.236	90,76%
1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.000.000	117.367.500	78,25%
1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	140.000.000	107.367.500	76,69%

DINAS SOSIAL

	dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	10.000.000	100,00%
1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0
2	Program Pemberdayaan Sosial	420.000.000	355.858.500	84,73%
2.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
2.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	0	0	0
2.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	420.000.000	355.858.500	84,73%
2.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	0	0
2.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	292.500.000	272.758.500	93,25%
2.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	97.500.000	83.100.000	85,23%
2.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	0	0
2.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	10.000.000	0	0
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	15.000.000	13.501.000	90,01%
3.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota Untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	15.000.000	13.501.000	90,01%
3.2.01.01	Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal	15.000.000	13.501.000	90,01%
4	Program Rehabilitas Sosial	2.581.000.000	2.533.493.500	98,16%
4.2.01	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	140.000.000	103.953.500	74,25%
4.2.01.01	Penyediaan Permakanan	12.000.000	12.000.000	100,00%
4.2.01.02	Penyediaan Sandang	22.500.000	22.500.000	100,00%
4.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	26.700.000	22.608.300	84,68%
4.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	22.745.000	19.545.000	85,93%
4.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	7.155.000	4.600.200	64,29%
4.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	3.900.000	3.900.000	100,00%
4.2.01.07	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak	5.000.000	5.000.000	100,00%
4.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.000.000	5.000.000	100,00%
4.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	5.000.000	3.080.000	61,60%
4.2.01.10	Pembelian Layanan Kedaruratan	5.000.000	0	0
4.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	15.000.000	3.520.000	23,47%
4.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	10.000.000	0	0
4.2.02	Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban	2.441.000.000	2.429.540.000	99,53%

	HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
4.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	10.000.000	0	0
4.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	10.000.000	8.540.000	85,40%
4.2.02.03	Penyediaan Permakanan	2.421.000.000	2.421.000.000	100,00%
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	315.000.000	285.088.300	90,50%
5.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	0	0	0
5.2.01.01	Rujukan Anak-Anak Terlantar	0	0	0
5.2.01.02	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	0	0	0
5.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	315.000.000	285.088.300	90,50%
5.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	29.956.000	99,85%
5.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	19.353.600	96,77%
5.2.02.03	Fasilitas Bantuan Sosial kesejahteraan keluarga	225.000.000	196.360.800	88,05%
5.2.02.04	Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	40.000.000	39.417.900	98,54%
6	Program Penanganan Bencana	67.500.000	49.271.500	72,99%
6.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	45.000.000	27.611.700	61,36%
6.2.01.01	Penyediaan Makanan	10.000.000	10.000.000	100,00%
6.2.01.02	Penyediaan Sandang	10.000.000	8.735.500	96,85%
6.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	10.000.000	4.193.300	56,67%
6.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	10.000.000	2.437.900	24,38%
6.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	5.000.000	2.245.000	44,90%
6.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	22.500.000	21.659.800	96,27%
6.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	7.500.000	6.659.800	88,80%
6.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	15.000.000	15.000.000	100,00%
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	62.000.000	60.797.000	98,06%
7.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	62.000.000	60.797.000	98,06%
7.2.01.01	Rehabilitas Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	22.000.000	21.500.000	97,73%
7.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	30.000.000	29.297.000	99,31%
7.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	100,00%

Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp.4.295.877.940,- dan realisasi sebesar Rp.3.925.041.473,- atau 91,37 % fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.80.000.000,00,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan

dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.79.629.000,- atau 99.54% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.15.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan.
 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.65.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 64.629.000,- atau 99,43% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan.
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.3.356.478.940,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 3.103.377.230,- atau 92.46% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan :
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi dana sebesar Rp.3.316.478.940,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 3.063.435.790,- atau 92,37% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan.
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp.15.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.14.966.400,- atau 99,78% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan.
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp.25.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar

Rp.24.975.040,- atau 99,90% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan.

- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.0,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau 0% fisik sebesar 0% kegiatan tidak bisa dilaksanakan dikarenakan terkena dampak virus covid-19.
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.75.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.68.242.600,- atau 90,99% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan :
1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp.8.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.7.990.100,- atau 99,88% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan.
 2. Penyediaan peralatan rumah tangga, dengan alokasi dana sebesar Rp. 8.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 7.996.600,- atau 99,96% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan.
 3. Penyediaan bahan logistik kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp.19.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.18.583.100,- atau 97,81% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan.
 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan alokasi dana sebesar Rp.15.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.14.900.000,- atau 99,33% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan.
 5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan alokasi dana sebesar Rp.15.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.10.330.000,-

atau 68,87% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan.

6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.8.442.800,- atau 84,43% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan.
- e) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.47.500.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.47.500.000,- atau 100% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan :
 1. Pengadaan mebel, dengan alokasi dana sebesar Rp.0,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau 0% fisik sebesar 0% dikarenakan refocusing anggaran terkena dampak covid-19.
 2. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp.47.500.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.47.500.000,- atau 100% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan.
- f) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.586.899.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.508.925.143,- atau 86,71% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan :
 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan alokasi dana sebesar Rp.67.927.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.36.594.107,- atau 53,87% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan.

2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp.15.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.14.931.800,- atau 99,55% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan.
 3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp.503.972.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.457.399.236,- atau 90,76% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan.
- g) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah , dengan alokasi dana sebesar Rp.150.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.117.367.500,- atau 78.25% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan :
1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, dengan alokasi dana sebesar Rp.140.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.107.367.500,- atau 76,69% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan.
 2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan.
 3. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp.0,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau 0% fisik sebesar 0% dikarenakan refocusing anggaran terkena dampak covid-19.

- 2) Program Pemberdayaan Sosial , dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp.420.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.355.858.500,- atau 84,73% dan fisik sebesar 100 %. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui kegiatan :
- a) Pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.0,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau 0% fisik sebesar 0% dikarenakan refocusing anggaran terkena dampak covid-19.
 - b) Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, dengan alokasi dana sebesar Rp. 420.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 355.858.500,- atau 84,73% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan :
 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau 0% fisik sebesar 100%. Kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena adanya virus covid-19 sehingga tidak boleh mengumpulkan massa. Oleh karena itu strategi pencapaiannya, Dinas Sosial memberdayakan Mitra Dinsos yaitu Koordinator Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam melakukan pembinaan terhadap 54 orang PSM.
 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.292.500.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan berupa operasionalnya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) selama 8 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.272.758.500,- atau 93,25% fisik sebesar 100%. Kegiatan pembinaan pada TKSK tidak bisa dilaksanakan karena adanya virus covid-19 sehingga tidak boleh mengumpulkan massa. Oleh karena itu strategi pencapaiannya, Dinas Sosial memberdayakan Mitra Dinsos yaitu Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam melakukan pembinaan terhadap 27 orang TKSK.

3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.97.500.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.83.100.000,- atau 85,23% fisik sebesar 100%. Kegiatan berupa pemberian tali asih para veteran pejuang kemerdekaan, janda pahlawan dan warakawuri sebanyak 50 orang, yang mana tali asih tersebut diberikan saat peringatan Upacara Hari Pahlawan.
 4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau 0% fisik sebesar 100%. Kegiatannya meliputi pembinaan pada Karang Taruna sebanyak 81 orang dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebanyak 33 LKS. Kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena adanya virus covid-19 sehingga tidak boleh mengumpulkan massa. Oleh karena itu strategi pencapaiannya, Dinas Sosial memberdayakan Mitra Dinsos yaitu Koordinator Karang Taruna dan Ketua Forum LKS dalam melakukan pembinaan.
 5. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau 0% fisik sebesar 100%. Kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena adanya virus covid-19 sehingga tidak boleh mengumpulkan massa. Oleh karena itu strategi pencapaiannya, Dinas Sosial memberdayakan Mitra Dinsos yaitu Koordinator LK3.
- 3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp.15.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.13.501.000,- atau 90,01% dan fisik sebesar 100 %. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Kegiatan :

- a) Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota Untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal, dengan alokasi dana sebesar Rp.15.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.13.501.000,- atau 90,01% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan :
1. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal, dengan alokasi dana sebesar Rp.15.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.13.501.000,- atau 90,01% fisik sebesar 100% yaitu pemberian fasilitas pemulangan 40 orang Warga Lamongan korban SARA di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.
- 4) Program Rehabilitasi Sosial, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp.2.581.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.2.533.493.500,- atau 98,16% dan fisik sebesar 100 %. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Kegiatan :
- a). Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, dengan alokasi dana sebesar Rp.140.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.103.953.500,- atau 74,25% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan :
1. Penyediaan Permakanan, dengan alokasi dana sebesar Rp.12.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.12.000.000,- atau 100% fisik sebesar 100%.
 2. Penyediaan Sandang, dengan alokasi dana sebesar Rp.22.500.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.22.500.000,- atau 100% fisik sebesar 100%.

3. Penyediaan Alat Bantu, dengan alokasi dana sebesar Rp.26.700.000,-. yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.22.608.300,- atau 84,68% fisik sebesar 100%.
4. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga, dengan alokasi dana sebesar Rp.22.745.000,-. yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.19.545.000,- atau 85,93% fisik sebesar 100%.
5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, dengan alokasi dana sebesar Rp.7.155.000,-. yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.4.600.200,- atau 64,29% fisik sebesar 100%.
6. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat, dengan alokasi dana sebesar Rp.3.900.000,-. yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.3.900.000,- atau 100% fisik sebesar 100%.
7. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran dan kartu identitas anak, dengan alokasi dana sebesar Rp.5.000.000,-. yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.5.000.000,- atau 100% fisik sebesar 100%.
8. Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, dengan alokasi dana sebesar Rp.5.000.000,-. yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.5.000.000,- atau 100% fisik sebesar 100%.
9. Pemberian layanan data dan pengaduan, dengan alokasi dana sebesar Rp.5.000.000,-. yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.3.080.000,- atau 61,60% fisik sebesar 100%.

10. Pemberian layanan kedaruratan, dengan alokasi dana sebesar Rp.5.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau 0% karena efisiensi anggaran.
 11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga, dengan alokasi dana sebesar Rp.15.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.3.520.000,- atau 23,47% fisik sebesar 100%.
 12. Pemberian layanan rujukan, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau 0% karena efisiensi anggaran.
- b) Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial, dengan alokasi dana sebesar Rp.2.441.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.2.429.540.000,- atau 99,53% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan :
1. Pemberian layanan data dan pengaduan, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau 0% karena efisiensi anggaran.
 2. Pemberian layanan kedaruratan, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.8.540.000,- atau 85,40% fisik sebesar 100% berupa pemberian bantuan uang transport untuk orang terlantar, kecopetan dan kehabisan bekal.
 3. Penyediaan permakanan, dengan alokasi dana sebesar Rp.2.421.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 4 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.421.000.000,- atau 100% fisik sebesar 100%.

Bantuan sosial berupa uang tunai langsung ke LKSA/Panti Asuhan selama 12 bulan yang diberikan pertribulan dalam 1 tahun.

- 5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp.315.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan dan realisasi sebesar Rp.285.088.300,- atau 90,50 % dan fisik sebesar 100 %. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Kegiatan :
- a) Pemeliharaan Anak-anak Terlantar, dengan alokasi dana sebesar Rp.0,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau 0% fisik sebesar 0% karena efisiensi anggaran.
 - b) Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.315.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan dan realisasi sebesar Rp.285.088.300,- atau 90,50 % dan fisik sebesar 100 %. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub Kegiatan:
 1. Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.30.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.29.956.000,- atau 99,85% fisik sebesar 100%.
 2. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.20.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.19.353.600,- atau 96,77% fisik sebesar 100%.
 3. Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga, dengan alokasi dana sebesar Rp.225.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.196.360.800,- atau 88,05% fisik sebesar 100% berupa operasional PKH.
 4. Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat, dengan alokasi dana sebesar Rp.40.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume

kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.39.417.900,- atau 98,54% fisik sebesar 100% meliputi operasional sembako dan Kube Fakmis.

6) Program Penanganan Bencana, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp.67.500.000,- dan realisasi sebesar Rp.49.271.500,- atau 72,99 % dan fisik sebesar 100 %. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Kegiatan :

a) Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.45.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali dan realisasi sebesar Rp.27.611.700,- atau 61,36 % dan fisik sebesar 100 %. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub Kegiatan:

1. Penyediaan makanan, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.10.000.000,- atau 100% fisik sebesar 100%.
2. Penyediaan sandang, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.8.735.500,- atau 96,85% fisik sebesar 100%.
3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.4.193.300,- atau 56,67% fisik sebesar 100%.
4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.2.437.900,- atau 24,38% fisik sebesar 100%.
5. Pelayanan dukungan psikososial, dengan alokasi dana sebesar Rp.5.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.2.245.000,- atau 44,90% fisik sebesar 100%.

b) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.22.500.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali dan realisasi sebesar

Rp.21.659.800,- atau 96,27 % dan fisik sebesar 100 %. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub Kegiatan:

1. Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana, dengan alokasi dana sebesar Rp.7.500.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.6.659.800,- atau 88,80% fisik sebesar 100%.
 2. Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana, dengan alokasi dana sebesar Rp.15.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.15.000.000,- atau 100% fisik sebesar 100%.
- 7) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp.62.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan dan realisasi sebesar Rp.60.797.000,- atau 98,06 % dan fisik sebesar 100 %. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Kegiatan :
- a) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp.62.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan dan realisasi sebesar Rp.60.797.000,- atau 98,06 % dan fisik sebesar 100 %. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub Kegiatan :
 1. Rehabilitasi sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.22.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.21.500.000,- atau 97,73%% fisik sebesar 100%.
 2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.30.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.29.297.000,- atau 99,31%% fisik sebesar 100%.
 3. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan

dengan volume kegiatan 2 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.10.000.000,- atau 100% fisik sebesar 100% .

BAB IV PENUTUP

Sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2021 adalah merupakan upaya pencapaian sistem akuntabilitas kinerja sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dibidang sosial dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, yang secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yakni efektif dan efisien.

Namun demikian berdasarkan kajian evaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lamongan yang dituangkan dalam LKjIP Tahun 2021 ini, dapat disimpulkan dan saran sebagai berikut :

1. Kesimpulan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah merupakan media pertanggungjawaban Dinas Sosial Kabupaten Lamongan terhadap hasil penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dan kemasyarakatan sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tujuan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan tahun 2021 menunjukkan angka 120,32% atau sangat baik.

Permasalahan dan Kendala Utama yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

- 1) Pemenuhan program dan kegiatan target kinerja RENSTRA 2016-2021 Dinas Sosial Kabupaten Lamongan yang masih belum tercapai;
- 2) Peningkatan efektifitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan semua Stakeholder terkait;
- 3) Santunan kepada Anak Terlantar, Lanjut Usia, Penyandang Cacat, Tuna Sosial, Gelandangan, Pengemis dan Bekas Narapidana masih belum memadai.
- 4) Fasilitas peningkatan pengetahuan dan keterampilan kepada tokoh masyarakat, LSM dan PMKS yang berpotensi melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan masih terbatas.
- 5) Pemberian bantuan penanggulangan bencana masih belum optimal.

2. Saran.

Untuk selanjutnya guna lebih mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, maka terhadap program-program yang telah ditetapkan khususnya terkait kebutuhan dasar masyarakat (sebagaimana RPJMD 2016-2021), disarankan ditingkatkan alokasi anggarannya sehingga dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan kajian evaluasi kinerja LKjIP Tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, hasil prestasi dapat dicapai antara lain :

1. PKH Award katagori verifikasi terbaik Tingkat Nasional Tahun 2012.
2. Karang Taruna “ Tunas Harapan “ Desa Mungli Kecamatan Kalitengah berprestasi Tingkat Nasional (10 Besar Tingkat Nasional) Tahun 2012.
3. Penghargaan KUBE terbaik tingkat nasional tahun 2015.
4. Penghargaan KUBE terbaik ke-3 tingkat Jawa Timur tahun 2017.
5. Penghargaan Pendamping Eks Pasung Jawa Timur tahun 2017.
6. Penghargaan terbaik ke-3 Jawa Timur tahun 2017 Penyaluran dan Pelunasan Tebusan Rastra.
7. Penghargaan Lomba Ayo Inklusif tahun 2018, Program Aku Bisa Teman (Bina Disabilitas Sejahtera Mandiri dan Bahagia).
8. Juara III Pilar Sosial TKSK Jawa Timur tahun 2018.
9. Juara I Penyuluh Agama Islam Tk. Nasional tahun 2018 Pengasuh LKS Format a.n Mukhlis Sajaya.

Lamongan, Januari 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMONGAN**

Drs. MOH. KAMIL, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611211 198603 1 016

